

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan terus – menerus demi tercapainya kehidupan di masa yang akan mendatang menjadi lebih baik. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Mutu sumber daya manusia sesuatu negara bisa dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan bagaimana perkembangan atau kondisi masyarakat di suatu negara secara terukur dan *representative*. IPM juga dapat menjelaskan bagaimana keadaan penduduk dapat mengakses pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam UNDP Indeks Pembangunan Manusia juga dipakai dalam melihat dan mengelompokkan apakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju, berkembang atau negara terbelakang. Indeks Pembangunan Manusia juga diukur dalam tiga dimensi diantaranya Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan (UNDP 2016). Agar tercapainya pembangunan manusia di sebuah negara atau daerah maka diperlukan sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Di dalam konteks ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai sumber daya fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan) dan aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan) dan juga aspek moralitas (iman) (Dewi, Yusuf, and Iyan 2016).

Dalam kurun waktu 2016-2020 nilai IPM Indonesia terus mengalami peningkatan (Grafik 1.1).

Grafik 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2016-2020



Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik 2022

Dari grafik 1.1 di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai IPM Indonesia yang cukup besar dari tahun 2016 ke tahun 2020. Pada tahun 2016 nilai IPM Indonesia adalah sebesar 70,18 dan meningkat menjadi 71,94 di tahun 2020. Namun demikian masih terjadi perbedaan yang cukup besar nilai IPM antar provinsi di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan nilai IPM provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Menurut Provinsi 2016-2020

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	70.00	70.60	71.19	71.90	71.99
Sumut	70.00	70.57	71.18	71.74	71.77
Sumbar	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38
Riau	71.20	71.79	72.44	73.00	72.71
Jambi	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29
Sumsel	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01
Bengkulu	69.33	69.95	70.64	71.21	71.40
Lampung	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69
Kep. Bangka Belitung	69.55	69.99	70.67	71.30	71.47
Kepri	73.99	74.45	74.84	75.48	75.59
DKI Jakarta	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77
Jabar	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09
Jateng	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87
DI Yogyakarta	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97
Jatim	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71
Banten	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45
Bali	73.65	74.30	74.77	75.38	75.50
NTB	65.81	66.58	67.30	68.14	68.25
NTT	63.13	63.73	64.39	65.23	65.19
Kalbar	65.88	66.26	66.98	67.65	67.66
Kalteng	69.13	69.79	70.42	70.91	71.05
Kalsel	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91
Kaltim	74.59	75.12	75.83	76.61	76.24
Kaltara	69.20	69.84	70.56	71.15	70.63
Sulut	71.05	71.66	72.20	72.99	72.93
Sulteng	67.47	68.11	68.88	69.50	69.55
Sulsel	69.76	70.34	70.90	71.66	71.93
Sulawesi Tenggara	69.31	69.86	70.61	71.20	71.45
Gorontalo	66.29	67.01	67.71	68.49	68.68
Sulbar	63.60	64.30	65.10	65.73	66.11
Maluku	67.60	68.19	68.87	69.45	69.49
Maluku Utara	66.63	67.20	67.76	68.70	68.49
Papua Barat	62.21	62.99	63.74	64.70	65.09
Papua	58.05	58.09	60.06	60.84	60.44
Indonesia	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik 2022

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan nilai IPM yang cukup besar di Indonesia, di mana pada tahun 2020 nilai IPM tertinggi yaitu 80,77 dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, sementara nilai IPM terendah adalah sebesar 60,44 yaitu Provinsi Papua. Perbedaan nilai IPM tidak saja terjadi di antara provinsi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Kab/kota di masing-masing provinsi, seperti yang juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2020 nilai IPM Jawa Tengah adalah sebesar 71,87, namun demikian terdapat variasi yang cukup besar nilai IPM di Kab/kota di Jawa Tengah (tabel 1.2).

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab Cilacap	68.60	68.90	69.56	69.98	69.95
Kab Banyumas	70.49	70.75	71.30	71.96	71.98
Kab Purbalingga	67.48	67.72	68.41	68.99	68.97
Kab Banjarnegara	65.52	65.86	66.54	67.34	67.45
Kab Kebumen	67.41	68.29	68.80	69.60	69.81
Kab Purworejo	70.66	71.31	71.87	72.50	72.68
Kab Wonosobo	66.19	66.89	67.81	68.27	68.22
Kab Magelang	67.85	68.39	69.11	69.87	69.87
Kab Boyolali	72.18	72.64	73.22	73.80	74.25
Kab Klaten	73.97	74.25	74.79	75.29	75.56
Kab Sukoharjo	75.06	75.56	76.07	76.84	76.98
Kab Wonogiri	68.23	68.66	69.37	69.98	70.25
Kab Karanganyar	74.90	75.22	75.54	75.89	75.86
Kab Sragen	71.43	72.40	72.96	73.43	73.95
Kab Grobogan	68.52	68.87	69.31	69.86	69.87
Kab Blora	66.61	67.52	67.95	68.65	68.84
Kab Rembang	68.60	68.95	69.46	70.15	70.02
Kab Pati	69.03	70.12	70.71	71.35	71.77
Kab Kudus	72.94	73.84	74.58	74.94	75.00
Kab Jepara	70.25	70.79	71.38	71.88	71.99
Kab Demak	70.10	70.41	71.26	71.87	72.22
Kab Semarang	72.40	73.20	73.61	74.14	74.10
Kab Temanggung	67.60	68.34	68.83	69.56	69.57
Kab Kendal	70.11	70.62	71.28	71.97	72.29
Kab Batang	66.38	67.35	67.86	68.42	68.65
Kab Pekalongan	67.71	68.40	68.97	69.71	69.63
Kab Pemasang	64.17	65.04	65.67	66.32	66.32
Kab Tegal	65.84	66.44	67.33	68.24	68.39
Kab Brebes	63.98	64.86	65.68	66.12	66.11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

**Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Menurut Kab/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	77.16	77.84	78.31	78.80	78.99
Kota Surakarta	80.76	80.85	81.46	81.86	82.21
Kota Salatiga	81.14	81.68	82.41	83.12	83.14
Kota Semarang	81.19	82.01	82.72	83.19	83.05
Kota Pekalongan	73.32	73.77	74.24	74.77	74.98
Kota Tegal	73.55	73.95	74.44	74.93	75.07
Provinsi Jateng	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, pada tahun 2020 Kota Salatiga merupakan kota yang memiliki nilai IPM tertinggi yaitu sebesar 83,14. Sementara itu Kab Brebes merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki nilai IPM terendah yaitu sebesar 66,11. Terjadi perbedaan atau kesenjangan yang cukup besar antara IPM tertinggi dengan IPM terendah. Hal ini mengindikasikan masih terdapat masalah dalam hal kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai IPM di Jawa Tengah Khususnya pada daerah-daerah dengan nilai IPM rendah.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai IPM, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Penelitian Chalid dan Yusuf (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel IPM. Selanjutnya dalam penelitian Dewi dan Sutrisna (2015) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM Kab/kota di Provinsi Bali. Penelitian Ariza (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Sedangkan penelitian Nainggolan *et al.* (2021) menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian Basuki (2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi nilai IPM adalah tingkat kemiskinan. Menurut penelitian Dewi (2006) menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Selanjutnya pada penelitian Winarti (2014) mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Penelitian Fatimah (2018) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Sedangkan Arifin (2017)

menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Faktor ketiga yang mempengaruhi IPM yaitu tingkat pengangguran. Menurut penelitian Meydiasari dan Soejoto (2017) menemukan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Begitu juga dengan penelitian Ningrum, Khairunnisa, dan Huda (2020) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Namun demikian hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Si'lang dan Hasid (2019) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan penelitian Kiha dan Seran (2021) menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM. Serta Malihah (2018) penelitian menyatakan variabel pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Berdasarkan fenomena masih adanya kesenjangan nilai IPM antar propinsi maupun antar Kab/kota di Indonesia serta adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait IPM, maka penelitian ini ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan untuk menambah bahan pustaka yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

